

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam mengimplementasikan teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) sebagai bagian dari upaya mewujudkan Smart Province DIY. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengadaptasi kerangka teoretis Van Buren et al. (2020) sebagaimana dioperasionalkan oleh Wadipalapa et al. (2024), yang menilai kesiapan AI dari tiga dimensi utama: 1.) Roadmap Strategis dan Dimensi Hukum, 2.) Ketersediaan Sumber Daya, 3.) Kesadaran Pemimpin. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemerintah daerah, analisis dokumen terkait digitalisasi, dan studi literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di DIY secara institusional sudah memanfaatkan teknologi AI, khususnya melalui sistem analitik berbasis AI pada pemantauan CCTV untuk mendukung *smart policing*. Namun, kesiapan secara kelembagaan dan sektoral masih terbatas, hal ini ditandai oleh belum adanya *roadmap* spesifik mengenai pemanfaatan AI, belum adanya regulasi yang mengatur kompleksitas AI, keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi teknis, keterbatasan finansial, serta masih terdapat tantangan terkait interoperabilitas sistem dan kualitas data. Kesadaran pimpinan terhadap potensi AI cukup tinggi, namun implementasinya masih bersifat sektoral dan belum menjadi strategi lintas sektor yang terstruktur.

Penelitian ini berkontribusi secara teoritis dalam memperluas penerapan model kesiapan AI di tingkat pemerintah daerah di Indonesia, serta secara praktis memberikan rekomendasi bagi Pemerintah DIY untuk memperkuat tata kelola data, pengembangan kapasitas SDM, dan penyusunan *roadmap* AI yang selaras dengan visi *smart province*.

Kata kunci: Kesiapan AI, Pemerintah Daerah, Artificial Intelligence, Sektor Publik, DI Yogyakarta, Smart Province

ABSTRACT

This study aims to analyze the readiness of the Regional Government of the Special Region of Yogyakarta (DIY) in implementing Artificial Intelligence (AI) technology as part of efforts to realize the Smart Province of Yogyakarta. Using a qualitative approach, the study adapts the theoretical framework of Van Buren et al. (2020), as operationalized by Wadipalapa et al. (2024), which assesses AI readiness across three main dimensions: (1) Strategic Roadmap and Legal Dimension, (2) Resource Availability, and (3) Leader Awareness. Data were collected through interviews with local government officials, document analysis related to digitalization, and literature review.

The findings show that, institutionally, the DIY government has begun to utilize AI technology particularly through AI-based analytics systems for CCTV monitoring to support smart policing. However, institutional and sectoral readiness remains limited, as indicated by the absence of a specific roadmap for AI utilization, the lack of regulations addressing AI complexity, limited human resources with technical competencies, financial constraints, and challenges related to system interoperability and data quality. Leadership awareness of AI's potential is relatively high, yet implementation remains sectoral and has not evolved into a structured cross-sectoral strategy.

Theoretically, this research contributes to expanding the application of the AI readiness model at the local government level in Indonesia. Practically, it offers recommendations for the Yogyakarta government to strengthen data governance, develop human resource capacity, and formulate an AI roadmap aligned with the smart province vision.

Keywords: AI Readiness, Local Government, Artificial Intelligence, Public Sector, Yogyakarta, Smart Province